

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rika Syahadatina
Ismiatika Fitriyana

Universitas Madura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau staff keuangan yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri 42 orang yang terdiri dari 40 orang PNS dan 2 orang tenaga honorer. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini, secara parsial variabel sumber daya manusia bidang keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Perubahan era Orde Baru ke era Reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi UU No.17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara) membawa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang di pertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Bastian, 2006;74).

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka peningkatan informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP No.24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau asset yang lebih transparan dan akuntabilitas. Karakteristik

kualitatif laporan keuangan menurut (PP No. 71 Tahun 2010) menurut SAP yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta (4) pemerintah.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah maupun organisasi tentang pemerintahan (Iftitah, 2013).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. Kualitas sumber daya manusia diperlukan juga untuk dapat menghindari penyelewengan seperti tindak korupsi, manipulasi atau *creative accounting*.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama dalam pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan. Seringkali tingkat pendidikan menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja di suatu bidang organisasi, maka semakin berpengalaman dan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah suatu entitas diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi maupun keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari tahun 2011-2013, mendapat opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) untuk tahun 2014-2015 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan medapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Implementasi sistem pengendalian intern menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pemimpin daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi, mengingat pemimpin daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran kepemimpinan daerah pada dasarnya ada di

semua tingkatan organisasi yang bersifat sistematis dan institusional. Sistematis yang artinya terkait dengan banyak orang yang bekerja berdasarkan suatu sistem dan pada tingkatan tertentu dalam hierarki organisasi. Sedangkan institusional melibatkan banyak orang dalam kepemimpinan tersebut dan masing-masing memiliki posisi dalam institusi tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam usaha mencapai kinerja daerah. Sehingga pemimpin daerah haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kerjasama di antara sistem yang ada dalam pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaannya. Belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah umumnya meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi. Belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas asset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tepat waktu.

Berdasar latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah; (1) Apakah sumber daya manusia bidang keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan? (2) Apakah sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan? (3) Apakah sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan?

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ; (1) pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pamekasan, (2) pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pamekasan, (3) pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pamekasan.

KAJIAN PUSTAKA

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi (Arfan, 2010;10). Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Judisuseno, 2008). Sumber daya manusia sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis khusus bagi organisasi (Sedarmayanti, 2014;30).

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya (Wati, 2014).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif

dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Rahayu dkk, 2014;3).

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan, untuk melaksanakan pekerjaan (Havesi, 2005 dalam Fadhilla, 2013;7). Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata yaitu (Griffin, 2004 dalam Husna, 2013:7).

Sistem Pengendalian Internal

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal.

Menurut *Commite Of Sponsoring Organizations (COSO)* dikutip oleh Jusup (2001;252) Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang memberikan keyakinan memadai dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama yang lain yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi.

Sistem pengendalian internal diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang handal. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal.

Arens et. Al. (2006;370) dialih bahasakan Herman Wibowo Tujuan umum dalam merancang pengendalian internal yang efektif yaitu:

1. Reliabilitas Pelaporan Keuangan.

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi.

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan.

Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu: (1)

Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan.

Menurut Mulyadi (2002;182) pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah: (1) Manajemen, (2) Dewan Komisaris dan Komite Audit, (3) Auditor Intern, (4) Personel lain Entitas, (5) Auditor Independen, (6) Pihak luar lain.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Menurut Bastian, (2006;96) Laporan keuangan adalah Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Mahsun, dkk (2007;56) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah

Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002;161) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Komponen-komponen Laporan Keuangan Daerah

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Unsur yang mencakup di neraca terdiri:

- a. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (PP No. 71 Tahun 2010) adalah “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki; Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) (Sugiyono, 2011;37).

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang berlokasi Jl. Stadion No. 58A Pamekasan. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui lapangan pada objek penelitian. Peneliti turun langsung ke objek penelitian untuk mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner kepada pegawai atau staff keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau staff keuangan yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari 40 orang PNS dan 2 orang tenaga honorer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan oleh peneliti adalah: (1) Semua pegawai atau staff keuangan BPKA, (2) Pegawai yang bukan staff keuangan dan akuntansi, (3) Tenaga honorer yang memiliki masa kerja kurang satu tahun periode penyusunan laporan keuangan.

Dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti maka sampel yang diambil sebanyak 31 pegawai atau staff keuangan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut.

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, modus, median, dan mean (Ghozali, 2013;19).
2. Uji Asumsi Klasik, dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda. Uji-uji yang dilakukan adalah:
 - a. Uji Normalitas, dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan metode uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal
 - b. Uji Multikolinieritas, uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel, dimana akan di ukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (Sunyoto, 2013;87). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).
 - c. Uji heterokedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser.
3. Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dua atau lebih variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y).
4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2), koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Siregar, 2013;252). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.
5. Uji Hipotesis
 - a. Uji Parsial (uji t); Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sunyoto, 2013;50).
 $H_{0,2}: \beta = 0$, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
 $H_{a1,2}: \beta \neq 0$, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
 - b. Uji Simultan (Uji F); Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2013;5).
 $H_{0,2}: \beta = 0$, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
 $H_{a1,2}: \beta \neq 0$, Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif akan menunjukkan gambaran mengenai suatu data yang akan diteliti. Adapun data deskriptif meliputi nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari semua variabel penelitian yang akan dianalisis.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sumber Daya Manusia (X1)	31	12	15	12,71	,973
Sistem Pengendalian Internal (X2)	31	68	82	71,77	4,072
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	31	24	29	25,29	1,616
Valid N (listwise)	31				

Sumber: Data diolah, SPSS

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui beberapa hal; jumlah responden yang digunakan sebanyak 31 sampel. Hasil dari tabel deskriptif diatas bahwa nilai minimum sumber daya manusia adalah 12 dan dengan nilai maximum adalah 15 dan untuk nilai rata-rata (mean) 12.71 adalah dengan standart deviation sebesar 0.973, nilai minimum sistem pengendalian internal adalah 68 dan dengan nilai maximum adalah 82 dan untuk nilai rata-rata (mean) adalah 71.77 dengan standart deviation sebesar 4.072, dan nilai minimum kualitas laporan keuangan adalah 24 dan dengan nilai maximum adalah 29 dan untuk nilai rata-rata (mean) adalah 25.29 dengan standart deviation sebesar 1.616.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi yang diperoleh tersebut digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap model regresi tersebut. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Hasil Uji Normalitas, perhitungan uji *one sample kolmogorov smirnov* dengan menggunakan *software SPSS 20* menunjukkan, bahwa signifikansi hasilnya diatas 0,05 yaitu 0.200 mengindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.
2. Hasil Uji Multikolineritas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas (*independen*) karena variabel sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal menunjukkan nilai VIF < 10.
3. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Setelah dilakukan uji glejser dengan menggunakan *software SPSS 20* menunjukkan, bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai signifikansi variabel sumber daya manusia 0.329 dan sistem pengendalian internal 0.114 semua variabel nilainya di atas 0.05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh beberapa variabel independen yaitu sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal dengan variabel

dependenyaitu kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian statistik regresi linier berganda, dengan menggunakan *software SPSS 20* yang disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		UnstandardizedCoefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,628	3,739		1,238	,226
	Sumber Daya Manusia (X1)	,164	,296	,099	,553	,585
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	,259	,071	,652	3,655	,001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber Data: Data diolah, SPSS

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan, bahwa hubungan antara sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.628 + 0.164X_1 + 0.259X_2 + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 4.628 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian internal adalah nol maka kualitas laporan keuangan adalah sebesar konstanta.
2. Nilai koefisien regresi sumber daya manusia sebesar 0.164 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0.164 satuan.
3. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0.259 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0.259 satuan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berikut ini hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel 3 dengan menggunakan *software SPSS 20* sebagai berikut:

Tabel 3

Model Summary

Hasil

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,723 ^a	,523	,488	1,156

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sumber Daya Manusia (X1)

Koefisien Determinasi (R²)

Sumber Data: Data diolah, SPSS

Hasil uji koefisien determinasi berganda (R²) adalah sebesar 0.523. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebesar 0.523 atau 52.3%. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal sebesar 52.3% dan sisanya sebesar (100% - 52.3% = 47.7%) dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,628	3,739		1,238	,226
	Sumber Daya Manusia (X1)	,164	,296	,099	,553	,585
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	,259	,071	,652	3,655	,001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber Data: Data diolah, SPSS

Dari hasil perhitungan tabel 4 dengan menggunakan *software SPSS 22* diketahui bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel terikat sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1 variabel sumber daya manusia bidang keuangan nilai signifikansi $0.585 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H₁ ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengujian Hipotesis 2 variabel sistem pengendalian internal nilai signifikansi $0.001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan H₂ diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga, sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji simultan disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40,964	2	20,482	15,325	,000 ^b
	Residual	37,423	28	1,337		
	Total	78,387	30			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber Data: Data diolah, SPSS

Dari hasil perhitungan tabel 5 dengan menggunakan *software SPSS 22* mengenai sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan H_3 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pembahasan

Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Hal yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pamekasan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2011-2013 disebabkan oleh kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sahrul Munir selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

“Perubahan turunnya opini itu disebabkan karena kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial yang seharusnya di anggarkan pada belanja tidak langsung dianggarkan pada APBD 2012 dan 2013 dianggarkan pada belanja langsung yang nilainya cukup material sehingga mempengaruhi opini dari wajar tanpa pengecualian menjadi wajar dengan pengecualian, jadi belanja langsung yang berupa transfer uang langsung itu dianggarkan pada belanja tidak langsung di ppkd namun pada ppkd tersebut dianggarkan belanja langsung di skpd, jadi jika belanja hibah dan bantuan yang berupa transfer uang langsung itu di anggarkan di ppkd atau di keuangan, namun pada APBD 2012-2013 dianggarkan pada belanja langsung di skpd pada APBD 2012-2013 dianggarkan pada belanja langsung di skpd, jadi selama 2tahun salah penganggaran.”

(Wawancara dengan Bapak Sahrul Munir selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan).

Pada tahun 2014-2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini disebabkan karena adanya perbaikan dan mempertahankan opini WTP tersebut.

“Memperbaiki kesalahan penganggaran yang terjadi di tahun 2012 dan 2013 yang sebelumnya hibah uang itu di anggarkan di skpd dianggarkan di ppkd, di tahun 2015 kan perubahan kebijakan penerapan berbasis akrual masa transisi kan itu, memang agak sulit disitu, ya ini kan perubahan jadi 2015 itu masih penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahap pertama tahun pertama sehingga kami mempertahankan opini WTP. Cuman kami mempersiapkan dari awal itu dengan matang misalnya terkait dengan penyusutan. Kan basis akrual harus ada penyusutan. Oleh sebab itu kita melakukan penyusutan dari awal. Jadi banyak yang dilakukan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual kita mempersiapkan 3 item yang penting:

1. Dibidang sumber daya manusia ini kita mengembangkan SDM bidang akuntansi karena keterbatasan kita sadari tenaga yang berlatar belakang akuntansi sangat terbatas. Oleh sebab itu kita memberdayakan tenaga yang ada dengan cara mengirim untuk diklat ke kkd menyekolahkan ke STAN mengirim training ke pemkot semarang yang telah menjalankan akuntansi berbasis akrual.
2. Regulasi (SPI) dengan menyusun peraturan bupati (perbup) nomor 37 tahun 2014 dan nomor 57 tahun 2014 dan peraturan akuntansi lainnya.
3. Sarana dan Prasarana dengan menyiapkan sistem berbasis IT atau software terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah (skpd), menyediakan software dari sistem, dan menyediakan komputer di skpd yang berbasis internet”.

(Wawancara dengan Bapak Sahrul Munir selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pamekasan).

Pengaruh Sumber Daya Manusia bidang Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Uji model regresi ini dilakukan dengan menggunakan statistik t (t-test), hasil signifikansi-t harus dibawah alpha yang telah ditetapkan sebesar 5% atau 0.05. Uji model regresi ini dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan α sebesar 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.585 > 0.05$ sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikansi variabel sumber daya manusia bidang keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan cermat, akurat dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun selain faktor SDM terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti masalah kurangnya pendidikan terhadap pengelolaan dan penganggaran dan sistem pengendalian internal. Akan tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang maksimal suatu instansi atau organisasi harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Uji model regresi ini dilakukan dengan menggunakan statistik t (t-test), hasil signifikansi-t harus dibawah alpha yang telah ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Uji model

regresi ini dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan α sebesar 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.001 < 0.05$ sehingga sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena sistem pengendalian internal berperan untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan instansi atau organisasi dan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Pengaruh Sumber Daya Manusia bidang Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Uji model regresi ini dilakukan dengan menggunakan statistik F, hasil signifikansi-F harus dibawah alpha yang telah ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Uji model regresi ini dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan α sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, Maka dapat disimpulkan H_3 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga, sumber daya manusia bidang keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan cermat, akurat dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Begitupun aktivitas pengendalian internal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena sistem pengendalian internal berperan untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan instansi atau organisasi dan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sumber daya manusia bidang keuangan (X1) sebesar $0.585 > 0,05$ Maka dapat disimpulkan sumber daya manusia bidang keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar $0.001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebesar $0.000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran

1. Dari hasil penelitian diatas sumber daya manusia bidang keuangan masih memiliki kekurangan dalam kemampuan yang dimiliki dan mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pemahaman akuntansi atau keuangan, selain itu juga mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaporan keuangan serta segala hal yang menyangkut kegiatan, dan program yang dapat mendukung tujuan instansi atau organisasi.
2. Penelitian ini masih terbatas pada pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52.3% sedangkan 47.7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., et al. (2006). *Auditing dan Jasa Assurance*. Alih bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat. Jakarta. Erlangga.
- Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Sumberdaya Manusia: Suatu Tinjauan Penilaian Modal Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati, Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, e-Journal S1 Ak (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Husna Fadhillah. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang). Artikel Ilmiah.
- Iftitah Dian Humairoh. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jusup Al. Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-Journal S1 Ak. (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).
- Liza Rahayu, Kennedy, Yuneita Anisma. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014.
- Mahsun Mohammad, et al. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA.

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Rinda Permata Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja SKPD Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Jom FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015.
- Sedarmayanti. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. Refika Aditama.
- Siregar Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS). Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.